



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	6

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



efa nurza/posmetro

VIDCON— Plt Wako Mardison Mahyuddin melakukan vidcon dengan pihak BPK Sumbar.

Master Plan E-Government Pemko sudah Dibuat

PLT Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengikuti vidcon dalam rangka Entry Meeting untuk pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Pariaman.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat. Ikut mendampingi kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Fadli, Kadiskominfo Hendri dan Sekretaris Inspektorat, Erpansayuti.

Kepala (BPK) Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi dalam pemaparannya mengatakan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, pe-

meriksaan ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 (Semester 1) pada pemerintah kota yang dilakukan dalam jangka waktu 35 hari yang terbagi atas 15 hari dilakukan secara daring (online) dan 20 hari kunjungan lapangan.

"Dalam pelaksanaannya kita akan melihat masing-masing pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan aplikasi layanan SPBE, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE secara terencana, periodik atas domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE sesuai pedoman yang berlaku," ujar Yusnadewi.

Plt. Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin menyambut baik kegiatan yang diselengga-

rakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat ini.

"Saya berterimakasih kepada BPK dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, secara pendahuluan Pemerintah Kota Pariaman sudah melakukan pemeriksaan dan patuh dengan aturan yang telah ditetapkan," ujarnya.

"Salah satu contoh yaitu pembuatan Data Center yang belum dilaksanakan, karena menimbang persyaratannya sebuah daerah harus bebas bencana sesuai undang-undang yang berlaku, dan juga Pemerintah Kota Pariaman sudah membentuk Master Plan E-Government serta melakukan perencanaan sebelum aturan itu keluar," tambah Mardison. "Kedepan kita akan perbaiki dan akan lakukan hal-hal yang lebih konkret dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan keuangan ini," tandasnya.(efa)